INFOGRAFIS

Optimalisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Ngawi sebagai Instrumen Respon Kemungkinan Keterjadian Korupsi

AGUS HARIMANTO, S.T., M.T., CGCAE

NDH:11



Tujuan Rencana Aksi:



Janaka Pende

denaan

Mentor

Capaian:

- 1.Terwujudnya pedoman atas Penunjukan Pemberi Keterangan Ahli dalam penanganan pengaduan atas permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (PKKN/D)
- 2. Meningkatkan kapasitas dasar auditor Irbansus melalui pelatihan teknis terkait audit Al dan PKKN/D Jangka Menengah
 - Melakukan MoU atau kerja sama teknis dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk sinkronisasi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit
- Meningkatkan efisiensi waktu penanganan dari pengaduan ke tahap audit, tahap hasil Al atau PKKN/D dan tahap penerbitan LHAI atau PKKN/D Jangka Panjang
- Menjadikan Irbansus Inspektorat Kabupaten Ngawi sebagai unit kerja yang handal dan profesional dalam penanganan kasus pengaduan berat dan korupsi
- Menciptakan sistem penghitungan PKKN yang cepat, akurat, dan diakui secara hukum untuk mempercepat proses penindakan

Org & Hk Setda Tim & Rapat

Koordinasi Tim Efektif

Peraturan Bupati tentang Pemberian Keterangan Ahli telah ditetapka<mark>n</mark> dan mulai diimplementasikan pada Pemerintah Kabupaten Ngawi

Latar Belakang:

Dalam pelaksanaan penanganan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara/Daerah diperlukan pedoman yang sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada dan dapat dijadikan pedoman bagi Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.



Manfaat dan Aksi Perubahan :

Manfaat Internal

1) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Auditor; 2) Efektivitas penanganan pengaduan yg berindikasi korupsi/penyimpangan; 3) Dukungan thdp Fungsi Pengawasan; 4) Penguatan peran Inspektorat dlm Penegakan Integritas.

Manfaat Eksternal

1) Meningkatkan Kepercayaan Publik; 2) Perlindungan Uang Negara dan Aset Publik; 3) Memperkuat Sinergi dgn APH; 4) Memiliki Komitmen Tinggi thdp Pemberantasan Korupsi



Pedoman

Keterangan

Ahli

Draft

Teknis

dan

Evaluasi